



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 819 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU AL MADINAH KUPUK BUNGKAL
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 59/Kw.13.2.5/PP.00/04/2019 tanggal 29 April 2019 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor: B-313/Kk.13.02/2/PP.03.1/03/2019 tanggal 1 Maret 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Terpadu Al Madinah Kupuk Bungkal Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU AL MADINAH KUPUK BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi Madrasah Tsanawiyah setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Mei 2019

Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MOCH. AMIN MAHFUD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 819 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
TERPADU AL MADINAH KUPUK
BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU AL MADINAH KUPUK BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO
2	Nomor Statistik Madrasah	121235020085
3	Alamat Madrasah	JALAN BERINGIN RT 1 RW 2 DESA/KELURAHAN KUPUK KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL MADINAH PONOROGO
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 61, SETYA BUDHI, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-7433.AH.01.04. TAHUN 2011 / 14 NOVEMBER 2011

Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MOCH. AMIN MAHFUD



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 02.0085 / 2019**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU AL MADINAH**
Alamat : **JALAN BERINGIN RT 1 RW 2**
Desa/Kelurahan : **KUPUK**
Kecamatan : **BUNGKAL**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN PONOROGO**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN AL MADINAH PONOROGO**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 61, SETYA BUDHI, SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-7433.AH.01.04. TAHUN 2011 / 14 NOVEMBER 2011**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	0	2	0	0	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 29 Mei 2019

Pit. **KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**


MOCH. AMIN MAHFUD



YAYASAN AL MADINAH PONOROGO

SK KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU - 7433-AH.01.04 Tahun 2011 | Akta Notaris Setya Budhi, SH. Tgl. 21 Juli 2011 Nomor 61

Kantor : Gang Langgeng Dusun Sumber Agung Ds.Kec. Balong - Ponorogo - Indonesia 63461

SURAT KEPUTUSAN

NO.25/YAP/VIII/2018

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU AL MADINAH PONOROGHO

Ketua Yayasan Al Madinah Ponorogo

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional, pihak swasta diberikan kesempatan untuk ikut berperan serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- Mengingat** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Madinah Ponorogo
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 Yayasan Al Madinah Ponorogo mendirikan Madrasah Tsanawiyah Terpadu Al Madinah Ponorogo, yang bertempat di Jalan Raya Bancar – Wringin Anom Dukuh Suki Desa Kupuk Kec. Bungkal Kab. Ponorogo.
- KEDUA** : Memberikan amanah kepada saudara Ghulam Rifa'i, S.Th.I untuk merealisasikan keputusan ini dan sekaligus sebagai pengelola Madrasah Tsanawiyah Terpadu Al Madinah Ponorogo.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 27 Agustus 2018

Ketua

Yayasan Al Madinah Ponorogo

H. Luqman Hakim, Lc. M.Ag.